

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor kehutanan pernah menjadi primadona dan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Namun seiring berjalannya waktu, sektor kehutanan mulai kehilangan daya tariknya. Memudarnya kejayaan sektor kehutanan tidak mungkin dipisahkan dari realitas kerusakan hutan sebagai refleksi dari kegagalan pengelolaan sumber daya hutan. Laju deforestasi yang cenderung tinggi adalah dampak dari tata kelola kehutanan yang tak kunjung membaik. Gagalnya pengelolaan hutan berimplikasi terhadap terdegradasinya sumber daya hutan. Hasil analisis *Forest Watch Indonesia / FWI* (2014) menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia pada periode 2009-2013 masih cukup tinggi dengan angka sekitar 1,13 juta Ha/tahun.

Lemahnya tata kelola hutan di Indonesia menyebabkan hampir separuh (46,5%) dari 120,3 juta hektar kawasan hutan negara tidak dikelola secara intensif (Kartodihardjo *et al*, 2011). Ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak disinyalir menjadi penyebab utama kegagalan dalam pelaksanaan program pembangunan hutan (pengelolaan hutan). Berkaca dari kegagalan tersebut, maka pemerintah menerapkan konsep pengelolaan hutan di tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai upaya memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.

Landasan hukum pembentukan KPH dimulai dari UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diikuti oleh PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, PP No.6 Tahun 2007 jo PP No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Permenhut No.6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH. KPH menurut peraturan perundangan tersebut didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan adanya konsep KPH, maka seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi

habis dalam wilayah KPH yang terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). Penetapan KPH tersebut didasarkan pada fungsi pokok yang terdapat pada kawasan hutan (konservasi, lindung, produksi). Pada wilayah KPH yang memiliki lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penamaan atau penetapannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

Sebagai unit terkecil pengelola hutan di tingkat tapak, KPH dibentuk dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat, serta batas administrasi pemerintahan. Keberadaan KPH akan mempermudah pengawasan terhadap kinerja pengelolaan hutan para pemegang ijin dan berbagai aktivitas lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan di dalam kawasan hutan. Keberadaan KPH akan menghasilkan sistem pengelolaan hutan yang lebih efektif karena kebijakan yang diambil didasarkan pada kondisi riil di lapangan.

Pada Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.77/Menhut-II/2010 terdapat 17 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 1 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas \pm 15.695 Ha dan 16 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas \pm 1.442.969 Ha. Dalam rangka mempercepat operasionalisasi KPH, maka dibentuklah KPH Model yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Dari 16 unit wilayah KPHP yang ada, sebanyak 3 unit telah ditetapkan sebagai KPHP Model dengan salah satunya berada di Kabupaten Sarolangun yaitu KPHP Model Limau (Unit VII) seluas 121.102 Ha.

KPHP Model Limau (Unit VII) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 714/Menhut-II/2011 tanggal 19 Desember 2011. Wilayahnya terdiri dari kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 43.807 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 22.502 Ha dan Hutan Lindung (HL) seluas 54.793 Ha. Beberapa potensi yang terdapat di dalamnya antara lain kayu dengan volume rata-rata berkisar antara 29,28 m³/Ha - 180,88 m³/Ha dan cadangan karbon atas permukaan antara 12,87 ton/Ha – 101,32 ton/Ha. Selain kayu, potensi non kayu

yang terdapat di dalamnya antara lain rotan, karet, madu, damar, dan cempedak. Untuk rotan ditemukan sebanyak 755 rumpun rotan yang terdiri dari 10 jenis yaitu rotan biasa, rotan tunggal, rotan gelang, rotan getah, rotan manau, rotan duduk, rotan semut, rotan udang, rotan kecil dan rotan sago dengan potensi antara 1 hingga 222 batang per hektar. Beberapa lokasi di dalam wilayah KPHP juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata seperti Air Terjun Seluro di Batang Asai, Goa Bukit Bulan dan sumber pemandian mata air dewa di Marga Bukit Bulan, serta sumber mata air asin pegunungan di Desa Sungai Keradak (Universitas Jambi, 2015).

Hampir seluruh kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi tidak terlepas dari permasalahan dalam pengelolaannya. Pada periode 2012-2013, Provinsi Jambi tercatat memiliki angka deforestasi sebesar 91.248,3 Ha/tahun. Secara nasional angka ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki laju deforestasi sebesar 273.355 Ha/tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Data dari Status Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2015 menyebutkan bahwa terjadi peningkatan laju deforestasi di Provinsi Jambi dengan angka 111.480 Ha/tahun. Forest Watch Indonesia (2014) bahkan memperkirakan pada tahun 2033 Provinsi Jambi akan kehilangan tutupan hutan alamnya. Tingginya angka deforestasi yang terjadi di Provinsi Jambi menggambarkan semakin tingginya tekanan terhadap kawasan hutan dan semakin terdesaknya keberadaan hutan untuk kegiatan lain di luar sektor kehutanan.

Kabupaten Sarolangun sendiri pada tahun 2014 tercatat memiliki angka deforestasi sebesar 8.718,43 Ha/tahun (Pemerintah Provinsi Jambi, 2015). Pada tahun 2015 berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2015 tercatat adanya kenaikan jumlah titik api menjadi 285 titik dari yang sebelumnya 143 titik. Selain itu pada tahun yang sama tercatat adanya 112 titik lokasi penambangan emas tanpa izin/illegal (PETI) yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Cermin Nan Gedang, Limun, Pauh, Mandiangin, Pelawan, Sarolangun, dan Bathin VIII (Pemerintah Provinsi Jambi, 2016). Akibat rusaknya hutan di daerah hulu, sepanjang tahun 2016 terdapat 26 kejadian banjir di Provinsi Jambi di mana Kabupaten Sarolangun merupakan yang tertinggi dengan jumlah kejadian sebanyak

5 kali dan nilai kerugian diperkirakan lebih dari Rp. 2,8 miliar (Pemerintah Provinsi Jambi, 2017).

Wilayah KPHP Model Unit VII-Hulu Sarolangun juga banyak menghadapi persoalan dalam kegiatan pengelolaannya seperti konflik tenurial, penambangan emas ilegal, *illegal logging*, dan perambahan baik untuk pemukiman maupun usaha perkebunan masyarakat yang dapat mengancam kelestarian hutan. Menurut Buku Data Status Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2015 terdapat sebanyak 53 titik lokasi aktivitas PETI yang letaknya berada di sekitar kawasan KPHP yakni pada Kecamatan Limun (27 titik) dan Kecamatan Cermin Nan Gedang (26 titik). Untuk Kecamatan Limun berdasarkan data yang dihimpun oleh BLHD Provinsi Jambi tahun 2014 ditemukan 400 mesin tambang (dompok) yang beroperasi di wilayah tersebut dengan jumlah pelaku sebanyak 3000 orang. Bahkan pada tahun 2015 kegiatan penambangan sudah menggunakan alat excavator dan telah memasuki kawasan hutan lindung yang berada di Dusun Manggis, Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun dengan jumlah alat yang beroperasi sebanyak 94 unit (Pemerintah Provinsi Jambi, 2017).

Timbulnya berbagai persoalan tersebut tidak jarang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Terdapat 3 kecamatan yang berpengaruh langsung terhadap kawasan KPHP Model Unit VII-Hulu Sarolangun yaitu Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun, dan Kecamatan Cermin Nan Gedang. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah dengan penghasilan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 tiap bulannya (Universitas Jambi, 2015). Faktor desakan kebutuhan ekonomi pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas terlarang di dalam kawasan hutan. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan kawasan hutan yang bermuara pada tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih luas dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Kondisi sumber daya hutan yang semakin menurun dan permasalahan sosial ekonomi (kesejahteraan) yang terjadi di sekitar kawasan hutan mendorong menguatnya pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat.

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 bahwa keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan sehingga dalam praktek pengelolaannya harus berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Beberapa literatur menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan hutan mampu mengatasi permasalahan yang ada di dalam kawasan hutan seperti perambahan, *illegal logging*, kebakaran, dan konflik penggunaan lahan (Rishi, 2007; Arifudin *et al*, 2013; dan Suwarno *et al*, 2009). Bolland *et al* (2012) dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif di dalam mengurangi laju deforestasi dibandingkan dengan kawasan yang ditetapkan dan dikelola sebagai hutan lindung. Sistem pengelolaan hutan yang partisipatif akan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga akan mengurangi gangguan atau tekanan terhadap kawasan hutan. Berkurangnya tekanan tersebut akan memberi dampak yang positif bagi kelestarian sumber daya hutan.

KPHP sebagai organisasi pengelola hutan di tingkat tapak dituntut untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. KPHP harus menjadi instrumen untuk perbaikan tata kelola hutan yang menjamin keadilan bagi para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat setempat. Masyarakat memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari.

Untuk mendukung dan menjamin hak-hak masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan hutan, pihak KPHP Model Unit VII-Hulu Sarolangun dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) mencoba merancang program pengelolaan hutan secara partisipatif dengan melibatkan beberapa desa yang berada di sekitarnya. Meskipun secara konseptual program yang direncanakan oleh KPHP telah berupaya mengakomodir kepentingan masyarakat, namun perlu diperhatikan apakah dalam implementasinya pihak pengelola (KPHP) telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan dengan baik. Apakah program yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bagaimana peran atau posisi masyarakat di dalamnya. KPHP dibentuk dengan harapan mampu mengatasi persoalan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu perlu

dirumuskan strategi yang mampu memfasilitasi tercapainya tujuan tersebut. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sumber daya hutan agar masyarakat mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal demi meningkatnya kesejahteraan mereka dan mewujudkan kelestarian hutan.

1.2 Rumusan Masalah

KPHP sebagai organisasi pengelola hutan di tingkat tapak memiliki peran penting dalam upaya menahan dan mengurangi laju kerusakan hutan di Indonesia. Sudah saatnya masyarakat yang selama ini terpinggirkan diberikan tempat untuk mengambil peran di dalam pengelolaan sumber daya hutan. Meningkatkan peran aktif masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat mendorong tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) serta meningkatkan kepedulian mereka untuk terus menjaga kelestarian hutan. Sejauh mana keterlibatan masyarakat (partisipasi) dalam kegiatan pengelolaan hutan akan menentukan tingkat keberhasilan program yang dijalankan.

Sebagai salah satu *stakeholder* di dalam pengelolaan kawasan hutan, analisis terhadap persepsi masyarakat perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara pandang masyarakat terhadap kawasan hutan. Sumardi dkk (1998) menyebutkan bahwa anggota masyarakat yang memiliki persepsi positif tentang hutan akan selalu melakukan tindakan yang positif, namun sebaliknya seseorang yang memiliki persepsi negatif cenderung melakukan tindakan yang bersifat destruktif. Persepsi masyarakat terhadap manfaat dari suatu program kegiatan juga memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk terlibat (berpartisipasi) di dalamnya. (Hedge dan Bull, 2011; Yanto, 2013; Bennett dan Dearden, 2014). Umumnya terdapat perbedaan persepsi antar individu yang satu dengan lainnya yang disebabkan oleh karakteristik individu masing-masing. Karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi antara lain umur, pendidikan, pengalaman, pendapatan, dan pekerjaan (Yuwono, 2006; Wulandari, 2010; Suryaningsih dkk, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dirumuskan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun agar hutan dapat dikelola secara lestari dan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan strategi tersebut antara lain aspek ekologi (lingkungan), sosial, dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi biofisik kawasan hutan KPHP yang berbatasan dengan areal desa?
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun?
3. Bagaimana persepsi masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan di dalam pengelolaan sumber daya hutan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun?
5. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun dalam pengelolaan hutan secara lestari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan permasalahan tersebut, secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan agar tercapai kelestarian hutan. Adapun secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis kondisi biofisik kawasan hutan KPHP yang berbatasan dengan areal desa.
2. Untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun.
3. Untuk menganalisis persepsi masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun.
4. Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan di dalam pengelolaan sumber daya hutan di KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun.

5. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Limau Unit VII-Hulu Sarolangun dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi Pemerintah (Pusat atau Daerah) maupun pihak KPHP Model Unit VII-Hulu Sarolangun dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan KPH.
2. Memberi tambahan wawasan dan arahan bagi masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hutan.
3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam dengan memberdayakan masyarakat lokal.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang kajian pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VII-Hulu Sarolangun dalam rangka pengelolaan hutan lestari belum pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menjadi referensi dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tujuan - Metode	Hasil
1.	I Putu Garjita, 2013. Tesis. Undip	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur di Sekitar Kawasan TN. Gunung Merapi Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Menganalisis persepsi dan partisipasi KTH di Desa Purwobinangun terhadap keberadaan TNGM. 2. Menganalisis tingkat keberdayaan KTH dari aspek ekonomi dan non ekonomi. 3. Merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat KTH dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan Metode : Analisis statistik deskriptif, AHP	1. Tingkat partisipasi dan persepsi KTH berada pada tingkat cukup. 2. Tingkat keberdayaan dikategorikan relatif rendah (< 50%). 3. Strategi yang disarankan antara lain : (1) peningkatan kesadaran, (2) fasilitasi peningkatan <i>capacity building</i> , (3) peningkatan partisipasi dan peran serta stakeholder
2	Fransisca Emilia, 2013. Tesis. Undip	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi DAS (Studi Kasus Desa Keseneng, Kec. Sumowono, Kab. Semarang)	1. Mengetahui aktivitas/fungsi pengelolaan SDA di Desa Keseneng, Kec. Sumowono, Kab. Semarang dan peranan pihak luar dalam pengelolaan tersebut. 2. Menganalisis aspek-aspek pengelolaan SDA berbasis masyarakat di Desa Keseneng. 3. Menggambarkan model konseptual CBNRM di Desa Keseneng dan menyusun model implementasi	1. Keempat aktivitas pengelolaan yang meliputi <i>planning, organizing, actuating</i> , dan <i>controlling</i> dilakukan dengan baik secara partisipatif oleh masyarakat dengan Pemkab Semarang dan LSM Komunitas Salunding berperan sebagai fasilitator. 2. Pada aspek CBNRM menunjukkan keberhasilan pada lima aspek yaitu <i>equity, empowerment, conflict resolution, knowledge and awareness</i> , dan <i>biodiversity protection</i> . 3. Rekomendasi yang ditawarkan adalah perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan terhadap inisiatif pengelolaan SDA berbasis masyarakat,

			CBNRM dalam mendukung konservasi DAS Metode : Analisis deskriptif kualitatif	replikasi model konseptual CBNRM untuk mendukung konservasi DAS, dan Desa Keseneng perlu bekerjasama dengan desa-desa tetangga untuk mendukung keberhasilan keenam aspek CMNRM.
3	Yuliana Dewi Rahmawati, 2015. Tesis. Undip.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak	1. Menganalisis implementasi tahapan pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Cangkring. 2. Menganalisis kesesuaian antara tahapan pemberdayaan dengan prinsip PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Cangkring. 3. Memberikan rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Desa Cangkring Metode : Analisa SWOT	1. Desa Cangkring telah memenuhi tiga dari 4 teori tahapan pemberdayaan Delivery yaitu : (a) tahap seleksi lokasi, (b) tahap sosialisasi pemberdayaan, (c) tahap proses pemberdayaan, sementara itu tahap pemandirian belum sepenuhnya dipenuhi. 2. Menurut teori Wilson, tingkat pemberdayaan di Desa Cangkring termasuk dalam tahap <i>Harnessing</i> karena setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. 3. Tahapan pemberdayaan di Desa Cangkring telah sesuai berdasarkan teori dan petunjuk teknis operasional PNPM MP 2008 dengan prinsip : (a) keberpihakan pada orang miskin, (b) demokratis, dan (c) keberlanjutan. 4. Strategi yang diambil berupa : (a) memaksimalkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dengan mengaplikasikan model pemberdayaan dalam pembangunan desa, (2) memanfaatkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan lingkungan dengan memanfaatkan potensi desa.
4.	Triyogo Widodo, 2006. Tesis. IPB.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Sekitar Hutan melalui Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis	1. Mengetahui dan menganalisis kapasitas LMDH dan kapasitas individu masyarakat miskin sekitar hutan dalam	1. Rendahnya kapasitas LMDH ditunjukkan dari tidak aktifnya kepengurusan LMDH. 2. Potensi lokal yang ada yaitu lahan hutan dan tersedianya tenaga kerja. Sedangkan perwujudan modal sosial ditunjukkan dari adanya

		Masyarakat (LMDH) : Studi Kasus Desa Tonjong, Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah.	kelembagaan PHBM. 2. Menganalisis dan menggali potensi lokal dan modal sosial. 3. Merumuskan strategi dan program yang tepat dalam upaya pengembangan kelembagaan PHBM di Desa Tonjong. Metode: PRA dan analisis deskriptif	3. Dapat disusun program aksi pengembangan kelembagaan PHBM di Desa Tonjong, yaitu penguatan kapasitas LMDH dan penguatan kapasitas individu masyarakat miskin sekitar hutan.
5.	Asnarulkhad A. Samah dan Fariboz Aref. 2011. Journal of American Science. Vol 7 (2). Hal : 186 - 195	<i>The Theoretical and Conceptual Framework and Application of Community Empowerment and Participation in Process of Community Development in Malaysia.</i>	Mendefinisikan dan membahas konsep partisipasi dalam konteks pembangunan sosial. Metode : Studi literatur.	1. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai proses di mana individu-individu terlibat dalam memulai, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kelompok dan kegiatannya. 2. Partisipasi adalah proses dinamis sehingga sulit untuk memprediksi atau bahkan untuk mengukur menggunakan penilaian standar karena partisipasi dibentuk oleh pengalaman individu dalam berpartisipasi.
6.	Dyer J et al. 2014. Journal of Environmental Management .	<i>Assessing participatory practices in Community-based Natural Resource Management : Experiences in Community Engagement from Southern Africa</i>	Mengidentifikasi praktek-praktek yang dapat meningkatkan kemungkinan keterlibatan penting masyarakat dalam proyek-proyek eksternal.	Terdapat faktor tambahan yang akan mempengaruhi keberhasilan proyek, antara lain : 1. Akses masyarakat dan kelancaran komunikasi. Adanya kesepakatan antara pemrakarsa proyek dengan masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang dikembangkan pada tahap awal keterlibatan sampai dengan akhir proses. Sementara pemahaman yang jelas tentang proyek merupakan kriteria penting evaluasi berbasis hasil. 2. Pemberdayaan, komunikasi dua arah pada semua tahap proses, keterlibatan dan kepemimpinan

				<p>karismatik didasarkan pada sikap saling menghormati dan komunikasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kemungkinan peserta mengembangkan pemahaman tentang tujuan dan filosofi</p> <p>3. Mekanisme yang digunakan dalam proses keterlibatan masyarakat kurang penting daripada faktor kontekstual untuk mewujudkan hasil proyek, tapi pertimbangan harus diberikan untuk mengidentifikasi metode yang tepat yang dapat menjamin keterwakilan masyarakat.</p>
7	<p>Elvida Y.S dan Iis Alviya. 2009. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 6 (1) : 57-70</p>	<p><i>Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar</i></p>	<p>1. Mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan KPH Banjar.</p> <p>2. Mengkaji implementasi dan strategi pembangunan KPH Banjar</p> <p>Metode: Analisa SWOT</p>	<p>Strategi pembangunan KPH Banjar perlu memprioritaskan peningkatan peran masyarakat, dukungan dan komitmen Pemda baik dalam PERDA maupun penyusunan RTRW yang sesuai, pengembangan SDM melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dan peningkatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam rangka sinkronisasi kegiatan dalam KPH Banjar.</p>

Setiap daerah memiliki potensi, karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat yang berbeda, sehingga strategi dan model pemberdayaan yang dihasilkan oleh penulis sebelumnya belum tentu sesuai jika diterapkan pada kelompok masyarakat desa sekitar hutan di kawasan KPHP Model Unit VII – Hulu Sarolangun. Hal itu disebabkan karena kondisi masyarakat yang sangat heterogen dan dinamis, sehingga model dan strategi pemberdayaan tidak bisa diseragamkan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat agar strategi yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu memecahkan persoalan yang dihadapi. Perbedaan lokasi, potensi, dan karakteristik

masyarakat (sosial, budaya, dan ekonomi) pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini karakteristik pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat. Selain itu penelitian tentang strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di KPHP Model Unit VII-Hulu akan menjadi aspek orisinalitas (keaslian) dari penelitian ini.